

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS DAN UMUM PADA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/siklus PBD
		Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 1 (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau Pengadilan. "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.	s/d ditetapkannya APBD	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
			Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2013 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013. KUA dan PPAS tidak termasuk dalam dokumen yang harus dipublikasikan dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan daerah			
2	BKPSDMD	Data Hasil Check Up perorangan ASN/ Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Evaluasi kinerja ASN /Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Tes Potensi / Kompetensi ASN / Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Data Rencana penempatan ASN /C ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Notulen hasil sidang Tim Penilaian Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
		Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di kalangan pengawai	Melindungi data pribadi
		Instrumen Penilaian Kinerja ASN /pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban udah dipersiapkan	Obyektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan
		Soal Tes CASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Dokumen Pertanggung Jawaban dan/atau Anggaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
3	Bagian Pemerintahan Setda Batang Hari	-	-	-	-	-
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Perangkat Khusus Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Kunci Sistem Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita/jalur komunikasi
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Berita/Radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita/ informasi rahasia
		Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
		Internet Protocol/IP Address Private.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Hasil penilaian oleh appraisal / penilai publik	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sampai Pengadaan Tanah dan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Sampai dengan pengadaan tanah selesai	Menimbulkan konflik bagi oknum tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan
		Penilaian oleh appraisal / penilai publik	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Sampai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh appraisal / penilai public selesai dan disampaikan kepada yang terdampak ganti kerugian	Tim appraisal / penilai publik tidak bisa di intervensi terhadap besaran nilai berdasarkan perhitungannya	Terjaminnya penilaian yang independensi tanpa adanya tekanan dari pihak lain
			Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum			

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI		
					Akibat jika Info Dibuka	Manfaat jika Info Dibuka	
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 79 ayat 3, Pasal 84 ayat 1	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	
		Data By Name By Address	Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Arsip Peta Foto Udara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf dan huruf j Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf dan huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i	Selama Masih Berlaku	Mengungkap Momerandum atau Surat Menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan terjaga	
		Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan:					
		a. Dokumen Keuangan					
		- SPJ berikut lampitannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum	
		- Dokumen anggaran beserta Otoritasnya					
		- Surat Pencairan Anggaran					
		b. Dokumen Karya Intelektual Oleh Lembaga/Swasta/ Kelompok/ perseorangan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlangsung Penyelenggaraannya	Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak	Melindungi Ha katas kekayaan intelektual	
		c. Data kekayaan Alam yang dilindungi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi	Melindungi Kekayaan Alam yang dilindungi	
		d. Data detail stok Produk Lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Merugikan Ketahanan Ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat	
		e. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Merugikan Kepentingan Pribadi	Melindungi Kepentingan Pribadi	
		f. Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Menggannggu Proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan	
		Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan:					
		a. Dokumen Keuangan					
- SPJ berikut lampitannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum			
- Dokumen anggaran beserta Otoritasnya	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2						
- Surat Pencairan Anggaran							
Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan disposisi dari pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Menggannggu Proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan			

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		
					Akibat jika Info Dibuka	Manfaat jika Info Dibuka	
		Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan (LHP) dan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) Kendaraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Dapat mengganggu keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP	Terjaminnya keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP	
		Momenrandum disposisi dan Surat - surat antar badan public yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Momenrandum disposisi dan Surat - surat antar badan public yang menurut sifatnya dirasiakan kecuali atas putusan komisininformasi atau pengadilan	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	
		Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan :	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17		Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		a. Dokumen Keuangan					
		- Laporan Hasil Pemeriksaan					
		b. Laporan Penanganan Kasus	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Sampai dengan terbitnya Laporan Penanganan Kasus selesai	Menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara prematur	Keberhasilan Penanganan Kasus	
Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai Keberhasilan			
8	DINAS SOSIAL	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan	
		Data Kelayan UPT (Penyandang HIV AIDS dan eks WIS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan	
		Identitas Korban Tindak Kekerasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan	
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	
		Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peraturan Menteri Sosial RI No.08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Dibuka jika dibutuhkan untuk kepentingan PPKS	Privasi PPKS bisa tersebarluaskan dan bisa disalgunakan	Membantu dalam Proses menyelesaikan masalah PPKS	

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peraturan Menteri Sosial RI No.03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Sampai ada perintah dari Kementerian Sosial RI.	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak yang tidak berhak	Mempermudah masyarakat untuk mengecek DTKS
		Bantuan Pengaman Sosial (BPS)	Peraturan Bupati Batang Hari No. 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari	Sampai keperluan Audit Eksternal atau Internal	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak yang tidak berhak	Terpublikasinya data masyarakat yang menerima BPS
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Informasi data pribadi dan hasil penyidikan dan penyelidikan yang ditangani oleh PPNS	Perda No. 06 Tahun 2024 Tentang PPNS	Tidak Terbatas	Rawan Intervensi dan Intimidasi dari pihak lain	Masyarakat akan memahami dan menyadari sanksi dari pelanggaran tersebut
			Permendagri No. 16 Tahun 2018 Tentang SOP Satpol - PP			
		Rencana Kegiatan Pengawasan terhadap Pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Pajak Daerah)	Perda No. 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan	Menghambat kesuksesan terlaksananya kegiatan penertiban	Objek yang dituji akan melengkapi berkas pajak serta melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu
		Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda Tertentu (Penyakit Masyarakat)	Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Asusila	Sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan	Menghambat kesuksesan terlaksananya kegiatan razia sehingga target akan melakukan pembelaan diri	Masyarakat paham terhadap perda dan larangan perbuatan tuna susila di wilayah kabupaten Batang Hari
10	INSPEKTORAT	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dipublikasikan oleh KPK	Mengungkap data pribadi PNS bersifat rahasia	Menjaga/melindungi kerahasiaan pribadi pegawai
		LHP BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan APIP Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Daftar Kasus dan Tindak lanjut pengawasan secara keseluruhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Rangkuman Anggaran SKPD berupa kwitansi dll	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP		Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Proses Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP		Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
11	BAGIAN UKPBJ SETDA BATANG HARI	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan	Mengamankan Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan
		Nota Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian dan Dokumen Lainnya yang masih dalam Proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang Klarifikasinya dinyatakan sangat Rahasia, Terbatas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Mengganggu Perlindungan Usaha dari Persaingan Tidak Sehat	Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual dan menghindari Persaingan usaha Tidak Sehat
			2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Menimbulkan Persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta Tender berkompetisi secara sehat dan adil
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik	Menjamin Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan dihalaman luar web (tanpa Log In Pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik	Menjamin Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Menjamin Tidak Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
		Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar Web (tanpa Log In Pengguna)	1. Pasal 17 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik; 2. UU No. 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat mengganggu Proses Pemilihan Penyedia, untuk menjaga Persaingan Usaha Tidak Sehat, menghadiri adanya intervensi selama proses	Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual dan menghindari Persaingan usaha Tidak Sehat
		Data Proses Pemilihan Penyedia	Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 Huruf b	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	LPSE Support berisi Identitas LPSE dan setiap Permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menjamin Tidak Terjadi Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		LPSE Support	Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Hak Akses Server bersifat Rahasia dan tidak dapat dibuka kepada public, mengakses aka menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Menjamin Tidak Terjadi Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Log In Akses Server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	Undang-Undang ITE 11/2008 Pasal 17 Huruf b dan c	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum		
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung dan lingkungan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan Penilaian kesesuaian Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permendagri No. 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Sampai diterbitkan Sertifikat Layak Fungsi	Disalahgunakan Oleh Pihak lain untuk kepentingan tertentu	Perusahaan / Bangunan telah memenuhi Syarat kelayakan bangunan/gedung

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Investigasi Kebakaran Bangunan / Gedung dan Lingkungan	Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Permendagri No. 164 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tidak terbatas	Disalahgunakan Oleh Pihak lain untuk kepentingan tertentu.	Kepastian Hukum atas penyebab terjadinya kebakaran
13	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mediasi	Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish hanya berupa Jumlah Kasus uang masuk dan Jumlah Kasus yang diselesaikan
		Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja	Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish hanya berupa Jumlah Kasus uang masuk dan Jumlah Kasus yang diselesaikan
		Data IKM, Data Jumlah Perusahaan dan Data Perizinan Bidang Industri	Undang - Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish karena bisa mengakibatkan Kerugian Pelaku Industri
14	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI & UKM	Data Pribadi Pengguna Layanan Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi Yng meliputi NIK, alamat, sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota keluarga	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan	Permanen	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data - data informasi pribadi seseorang	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang keterbukaan publik		Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi pemilik yang bersangkutan <b>mengungkap rahasia pribadi</b>	
			Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.		Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	
		Dokumen Perizinan beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang keterbukaan informasi publik	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan / perorangan yang bersifat rahasia	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		Catatan Penilaian Review terhadap riset potensi unggulan daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang keterbukaan informasi publik	Selama Riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		Data Debitur/Pihak Ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		Data Keuangan Usaha Kecil menengah (UKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik UKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		Laporan Hasil Pengawasan Koperasi		Jangka Waktu pengecualian Informasi akan dibuka atas permintaan pengadilan / penyelidikan	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		a. Pokok - Pokok temuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e tentang keterbukaan informasi public	Permanen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		b. Rekomendasi tindak lanjut	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 39 ayat 2			
c. Sanksi yang diterapkan	Permenkop UKM RI No. 17 Tahun 2015					
Data SP2D	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Nomor 2 PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006					

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Laporan keuangan yang belum di audit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Nomor 2 PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara dan menghindari kesalahpahaman terhadap formasi	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
		SPJ : Nota, Kwitansi, Buku Pengeluaran, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Rincian SPJ, Buku Pembantu Bank, Rincian SPJ, Buku Pembantu Pajak	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah	Tidak terbatas	Merugikan Proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
15	Bagian Umum Setda Batang Hari	-	-	-	-	-
16	SEKRETARIAT DPRD	Hasil/notulen rapat pimpinan, AKD, dan pansus	Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di DPRD pasal 11 ayat 1	selama masih berlaku	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik		Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	
		Arsip aktif, dinamis dan inaktif yang berisikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik	selama masih berlaku	Terhambatnya proses penegakkan hukum	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		a. Dokumen Keuangan - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran beserta Otoritasnya - Surat Pencairan Anggaran	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsungnya penyelenggaraan	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	
		c. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	selama status perlindungan masih berlaku	terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	Terlindunginya kepentingan kepemilikan pribadi
		d. Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan pasal (1) ayat 22	selama masih berlaku	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	Terlaksananya kegiatan dengan lancar
		Permintaan data by name by adres anggota DPRD dan PNS	UU Nomor 24 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat (1) huruf e			
		Data pribadi penduduk (nomor KK, NIK) DPRD dan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Diketahui nya rahasia pribadi seseorang	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan					
	Laporan Keuangan yang belum di audit	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 31 ayat (1)	Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan yang telah diaudit	Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terbantunya keberhasilan pelaksanaan pembangunan	
17	Bagian Organisasi Setda Batang Hari	-	-	-	-	-
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	Dana Hibah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Diketahui atas peruntukan penggunaan dana tersebut	Kerahasiaan keuangan organisasi penerima hibah terbuka
		Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pindahtanganan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i Tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pindahtanganan/siklus PBD
		Pendapatan sektor retribusi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i Tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j Perda Nomor 1 Tahun 2024	Sampai keperluan Audit Eksternal atau Internal	Penyagunaan data oleh pihak yang berhak	Melindungi/mengamankan database restribusi
		Perhitungan rancangan APBD dan APBD Perubahan Dinas PARPORA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Setelah disahkan dan disetujui oleh DPRD serta dievaluasi Pemerintah	Penyagunaan data oleh pihak yang berhak	Melindungi/mengamankan database subjek dan objek

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf l tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Setelah di audit Inspektorat	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai Keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		Pertanggungjawaban dana hibah	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah	Setelah di audit Inspektorat dan BPK	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai Keberhasilan pelaksanaan pembangunan
19	DINAS PMPTSP	Dokumen perizinan yang ada di gudang arsip	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memberi rasa aman bagi pelaku usaha
			Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko	Selama ada perintah hakim pengadilan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	
		Dokumen hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha/perusahaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi
		Laporan kegiatan penanaman modal yang belum tervalidasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi
		Data aplikasi online Single Submission pelaku usaha	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kegiatan Intelejen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah
			Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara			
		Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia
Daftar nama exs Napiter (narapidana teroris)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia		
21	BPBD	-	-	-	-	-
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi pelaksan di lingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi tenaga fungsional guru di lingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/Data terkait rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/Data penerima Beasiswa Tangguh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	sampai ada SK penetapan penerima beasiswa	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi penerima beasiswa tangguh yang bersifat pribadi
		Data hasil Evaluasi kinerja ASN /Pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
		Identitas Pengawas/penilik/pengawas sekolah/guru/tenaga pendidik/pamong belajar yang diduga melanggar disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data rencana penempatan pengawas/penilik/kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan/pamong belajar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Notulen hasil sidang Tim Penilaian Kinerja	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
		Instrumen Penilaian Kinerja ASN /pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban udah dipersiapkan	Objektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan
		Dokumen Pertanggung Jawaban dan/atau Anggaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Data kesehatan/keluarga/rekening tabungan/pinjaman pegawai/hak kekayaan pribadi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
		Data penjatuhan disiplin/hukuman disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
23	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Dokumen Keuangan - Dokumen anggaran beserta otoritasnya - Surat pencairan - SPJ berikut lampiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan (LHP) dan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) Kendaraan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengganggu keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP	Terjamin dan terawatnya KIP dan LHP
		Dokumen proses penilaian usaha perkebunan (PUP)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat proses penilaian	Melindungi rahasia dokumen
24	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dokumen dan Berita acara pemeriksaan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I Tentang Keterbukaan Publik	10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan perkara	Dapat menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara			
			Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil			
		Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I Tentang Keterbukaan Publik	10 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	privasi berkaitan dengan data hak pribadi yang rahasia tidak terlindungi	Dapat menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara			
			Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil			

**BUPATI BATANG HARI**

**MUHAMMAD FADHIL ARIEF**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS DAN UMUM PADA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

No	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Dibuka
1	2	3	4	5	6	7
1  A	SEKRETARIAT DAERAH	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan	Mengamankan Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan
	BAGIAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	Nota Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian dan Dokumen Lainnya yang masih dalam Proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang Klarifikasinya dinyatakan sangat Rahasia, Terbatas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf i	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Mengganggu Perlindungan Usaha dari Persaingan Tidak Sehat	Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual dan menghindari Persaingan usaha Tidak Sehat
			2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia			
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Menimbulkan Persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta Tender berkompetisi secara sehat dan adil

		Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa Log In Pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik	Menjamin Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik	Menjamin Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar Web (tanpa Log In Pengguna)	1. Pasal 17 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik;	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat Menimbulkan Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Menjamin Tidak Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
			2. UU No. 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;			
			3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
		Data Proses Pemilihan Penyedia	Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 Huruf b	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Dapat mengganggu Proses Pemilihan Penyedia, untuk menjaga Persaingan Usaha Tidak Sehat, menghadiri adanya intervensi selama proses	Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual dan menghindari Persaingan usaha Tidak Sehat
		LPSE Support	Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	LPSE Support berisi Identitas LPSE dan setiap Permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menjamin Tidak Terjadi Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik
		Data Log In Akses Server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	Undang-Undang ITE 11/2008 Pasal 17 Huruf b dan c	30 (Tiga Puluh) Tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan/Lembaga Penegak Hukum	Hak Akses Server bersifat Rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Menjamin Tidak Terjadi Penyalahgunaan Aplikasi Secara Elektronik

2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Hasil/notulen rapat pimpinan, AKD, dan pansus	Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di DPRD pasal 11 ayat 1	selama masih berlaku	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik		Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	
		Arsip aktif, dinamis dan inaktif yang berisikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik	selama masih berlaku	Terhambatnya proses penegakkan hukum	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		a. Dokumen Keuangan - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran beserta Otoritasnya - Surat Pencairan Anggaran	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsungnya penyelenggaraan	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	
		c. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat d. Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	selama status perlindungan masih berlaku	terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	
		Permintaan data by name by adres anggota DPRD dan PNS	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan pasal (1) ayat 22	selama masih berlaku	Terganggunya kepentingan perlindungan hak	Terlaksananya kegiatan dengan lancar
			UU Nomor 24 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat (1) huruf e			
		Data pribadi penduduk (nomor KK, NIK) DPRD dan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Diketahuinya rahasia pribadi seseorang	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		Laporan Keuangan yang belum di audit	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 31 ayat (1)	Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan yang telah diaudit	Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terbantunya keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		3	INSPEKTORAT DAERAH	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dipublikasikan oleh KPK
LHP BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan APIP Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP			30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan

4	BADAN KEUANGAN DAERAH	Daftar Kasus dan Tindak lanjut pengawasan secara keseluruhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Rangkuman Anggaran SKPD berupa kwitansi dll	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP		Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
		Proses Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP		Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
		Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/siklus PBD
		Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 1 (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau Pengadilan. "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.	s/d ditetapkannya APBD	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
			Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2013 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013. KUA dan PPAS tidak termasuk dalam dokumen yang harus dipublikasikan dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan daerah			
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi pelaksan dilingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

6	DINAS SOSIAL	Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi tenaga fungsional guru di lingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/Data terkait rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas PDK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	sampai telah ada penetapan dari pejabat pembina kepegawaian	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat Kesuksesan Kebijakan	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/Data penerima Beasiswa Tangguh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	sampai ada SK penetapan penerima beasiswa	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi penerima beasiswa tangguh yang bersifat pribadi
		Data hasil Evaluasi kinerja ASN /Pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Identitas Pengawas/penilik/pengawas sekolah/guru/tenaga pendidik/pamong belajar yang diduga melanggar disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data rencana penempatan pengawas/penilik/kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan/pamong belajar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Notulen hasil sidang Tim Penilaian Kinerja	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan Proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
		Instrumen Penilaian Kinerja ASN /pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban udah dipersiapkan	Objektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan
		Dokumen Pertanggung Jawaban dan/atau Anggaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Data kesehatan/keluarga/rekening tabungan/pinjaman pegawai/hak kekayaan pribadi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
		Data penjatuhan disiplin/hukuman disiplin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan		

7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV AIDS dan eks WIS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan
		Identitas Korban Tindak Kekerasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan
		Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Dibuka jika dibutuhkan untuk kepentingan PPKS	Privasi PPKS bisa tersebarluaskan dan bisa disalahgunakan	Membantu dalam Proses menyelesaikan masalah PPKS
		Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Peraturan Menteri Sosial RI No.03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Sampai ada perintah dari Kementerian Sosial RI.	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak yang tidak berhak	Mempermudah masyarakat untuk mengecek DTKS
		Bantuan Pengaman Sosial (BPS)	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari	Sampai keperluan Audit Eksternal atau Internal	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak yang tidak berhak	Terpublikasinya data masyarakat yang menerima BPS
		Informasi data pribadi dan hasil penyidikan dan penyelidikan yang ditangani oleh PPNS	Perda Nomor 06 Tahun 2024 Tentang PPNS Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang SOP Satpol - PP	Tidak Terbatas	Rawan Intervensi dan Intimidasi dari pihak lain	Masyarakat akan memahami dan menyadari sanksi dari pelanggaran tersebut
		Rencana Kegiatan Pengawasan terhadap Pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Pajak Daerah)	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan	Menghambat kesuksesan terlaksananya kegiatan penertiban	Objek yang dituju akan melengkapi berkas pajak serta melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu
		Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda Tertentu (Penyakit Masyarakat)	Perda Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Asusila	Sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan	Menghambat kesuksesan terlaksananya kegiatan razia sehingga target akan melakukan pembelaan diri	Masyarakat paham terhadap perda dan larangan perbuatan tuna susila di wilayah kabupaten Batang Hari

8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung dan lingkungan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan Penilaian kesesuaian	Sampai diterbitkan Sertifikat Layak Fungsi	Disalahgunakan Oleh Pihak lain untuk kepentingan tertentu	Perusahaan / Bangunan telah memenuhi Syarat kelayakan bangunan/gedung
			Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.			
			Permendagri No. 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah			
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Investigasi Kebakaran Bangunan / Gedung dan Lingkungan	Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.	Tidak terbatas	Disalahgunakan Oleh Pihak lain untuk kepentingan tertentu.	Kepastian Hukum atas penyebab terjadinya kebakaran
			Permendagri No. 164 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Miimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota			
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnduk Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang
			Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnduk Pasal 79 ayat 3, Pasal 84 ayat 1			
10	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	Data By Name By Addres	Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang
		Dana Hibah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Diketahui atas peruntukan penggunaan dana tersebut	Kerahasiaan keuangan organisasi penerima hibah terbuka
		Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I Tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/ berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/siklus PBD
		Pendapatan sektor retribusi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j Perda Nomor 1 Tahun 2024	Sampai keperluan Audit Eksternal atau Internal	Penyagunaan data oleh pihak yang berhak	Melindungi/mengamankan database retribusi
		Perhitungan rancangan APBD dan APBD Perubahan Dinas PARPORA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Setelah disahkan dan disetujui oleh DPRD serta dievaluasi Pemerintah	Penyagunaan data oleh pihak yang berhak	Melindungi/mengamankan database subjek dan objek
		Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 Huruf j	Setelah di audit Inspektorat	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurn	Membantu mencapai Keberhasilan pelaksanaan pembangunan

11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pertanggungjawaban dana hibah	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah	Setelah di audit Inspektorat dan BPK	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai Keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		Dokumen perizinan yang ada di gudang arsip	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memberi rasa aman bagi pelaku usaha
			Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko	Selama ada perintah hakim pengadilan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	
		Dokumen hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha/perusahaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi
		Laporan kegiatan penanaman modal yang belum tervalidasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi
Data aplikasi online Single Submission pelaku usaha	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan masih berjalan	Terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia perusahaan	Menjamin kenyamanan dan rahasia perusahaan dalam berinvestasi		
12	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mediasi	Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish hanya berupa Jumlah Kasus uang masuk dan Jumlah Kasus yang diselesaikan
		Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja	Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish hanya berupa Jumlah Kasus uang masuk dan Jumlah Kasus yang diselesaikan
		Data IKM, Data Jumlah Perusahaan dan Data Perizinan Bidang Industri	Undang – Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008	Tidak terbatas	Tidak dapat dipublikasikan secara detail	Tidak dapat di Publish karena bisa mengakibatkan Kerugian Pelaku Industri
13	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	Data Pribadi Pengguna Layanan Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi Yng meliputi NIK, alamat, sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota keluarga	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan	Permanen	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data – data informasi pribadi seseorang	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang keterbukaan publik		Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi pemilik yang bersangkutan mengungkap rahasia pribadi	
			Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.		Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	

14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen Perizinan beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang keterbukaan informasi publik	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan / perorangan yang bersifat rahasia	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan	
		Catatan Penilaian Review terhadap riset potensi unggulan daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang keterbukaan informasi publik	Selama Riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan	
		Data Debitur/Pihak Ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan	
		Data Keuangan Usaha Kecil menengah (UKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik UKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan	
		Laporan Hasil Pengawasan Koperasi		Jangka Waktu pengecualian Informasi akan dibuka atas permintaan pengadilan / penyelidikan	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan	
		a. Pokok - Pokok temuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e tentang keterbukaan informasi publik				
		b. Rekomendasi tindak lanjut	UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 39 ayat 2				
		c. Sanksi yang diterapkan	Permenkop UKM RI No. 17 Tahun 2015				
		Data SP2D	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Nomor 2	Permanen		Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
			PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3				
			Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4				
			Permendagri Nomor 13 Tahun 2006				
		Laporan keuangan yang belum di audit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Nomor 2	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan		Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara dan menghindari kesalahpahaman terhadap formasi	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan
PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3							
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4							
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006							
SPJ : Nota, Kwitansi, Buku Pengeluaran, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Rincian SPJ, Buku Pembantu Bank, Rincian SPJ, Buku Pembantu Pajak	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah	Tidak terbatas		Merugikan Proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu pencapaian keberhasilan pembangunan		
Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas		Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi		

15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Perangkat Khusus Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Kunci Sistem Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita/jalur komunikasi
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
		Berita/Radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita/ informasi rahasia
		Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
		Internet Protocol/IP Address Private.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
		Arsip Peta Foto Udara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf dan huruf j	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d			
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf dan huruf d	Selama Masih Berlaku	Mengungkap Momerandum atau Surat Menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan terjaga
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i			
		Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan:				
		a. Dokumen Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		- SPJ berikut lampitannya				
		- Dokumen anggaran beserta Otoritasnya				
		- Surat Pencairan Anggaran				
		b. Dokumen Karya Intelektual Oleh Lembaga/Swasta/ Kelompok/ perseorangan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlangsung Penyelenggaraannya	Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak	Melindungi Ha katas kekayaan intelektual
		c. Data kekayaan Alam yang dilindungi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi	Melindungi Kekayaan Alam yang dilindungi
		d. Data detail stok Produk Lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Merugikan Ketahanan Ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
		e. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Merugikan Kepentingan Pribadi	Melindungi Kepentingan Pribadi
		f. Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Selama Masih Berlaku	Menggannggu Proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan
Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan:						
a. Dokumen Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum		
- SPJ berikut lampitannya						
- Dokumen anggaran beserta Otoritasnya						
- Surat Pencairan Anggaran						
	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2					

16	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Momerandum Surat – Surat penting yang perlu dirahasiakan disposisi dari pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Menggannggu Proses Pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan
		Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan (LHP) dan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) Kendaraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Dapat mengganggu keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP	Terjaminnya keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP
		Momenrandum disposisi dan Surat - surat antar badan public yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Memorandum disposisi dan Surat - surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisininformasi atau pengadilan	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
		Arsip dinamis aktif dan inaktif yang berisikan :	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama Masih Berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		a. Dokumen Keuangan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		b. Laporan Penanganan Kasus	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	Sampai dengan terbitnya Laporan Penanganan Kasus selesai	Menghambat kesuksesan penanganan kasus karena ada pengungkapan secara prematur	Keberhasilan Penanganan Kasus
		Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama Masih Berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai Keberhasilan
		Dokumen dan Berita acara pemeriksaan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I Tentang Keterbukaan Publik	10 tahun atau sepanjang pegawai terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan perkara Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara	Dapat menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara			
Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil						
Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I Tentang Keterbukaan Publik	10 tahun atau sepanjang pegawai terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	privasi berkaitan dengan data hak pribadi yang rahasia tidak terlindungi	Dapat menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya		
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara					
	Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil					

17	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Dokumen Keuangan - Dokumen anggaran beserta otoritasnya - Surat pencairan - SPJ berikut lampiran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
		Laporan Hasil pemeriksaan Kendaraan (LHP) dan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) Kendaraan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengganggu keamanan dan terawatnya dokumen KIP dan LHP	Terjamin dan terawatnya KIP dan LHP
		Dokumen proses penilaian usaha perkebunan (PUP)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Mengganggu Proses Penyusunan/ Menghambat proses penilaian	Melindungi rahasia dokumen
18	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Hasil penilaian oleh appraisal / penilai publik	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sampai Pengadaan Tanah dan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Sampai dengan pengadaan tanah selesai	Menimbulkan konflik bagi oknum tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan
		Penilaian oleh appraisal / penilai publik	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum PP Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Sampai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh appraisal / penilai public selesai dan disampaikan kepada yang terdampak ganti kerugian	Tim appraisal / penilai publik tidak bisa di intervensi terhadap besaran nilai berdasarkan perhitungannya	Terjaminnya penilaian yang independensi tanpa adanya tekanan dari pihak lain
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Data Hasil Check Up perorangan ASN/ Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Evaluasi kinerja ASN /Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Tes Potensi / Kompetensi ASN / Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Data Rencana penempatan ASN /C ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang PNS yang bersifat rahasia
		Notulen hasil sidang Tim Penilaian Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di kalangan pegawai	Melindungi data pribadi
		Instrumen Penilaian Kinerja ASN /pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban udah dipersiapkan	Obyektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan
		Soal Tes CASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Dokumen Pertanggung Jawaban dan/atau Anggaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Kegiatan Intelejen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah
		Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia
		Daftar nama exs Napiter (narapidana teroris)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi	Mengungkap data pribadi bersifat rahasia

**BUPATI BATANG HARI**

**MUHAMMAD FADHIL ARIEF**